



# DHARMASMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. XII Nomor 22 Oktober 2013

ISSN : 1693 - 0304

- I Nyoman Agus Sudipta **1** Brahmaidya  
Dalam Pelaksanaan Sumpah Cor
- I Putu Mardika **14** Kajian Fenomenologi Ritual  
Nampah Batu Di Pura Puseh  
Desa Pakraman Depaha
- Yenny Setiawati **34** Sistem Religi Dalam Pluralitas  
Beragama Di Pura Aditya Jaya,  
Rawamangun, Jakarta
- I Nyoman Murba Widana **56** Konstruksi Identitas Hindu  
Etnis Bali Di Lombok Tengah
- Ni Wayan Karmini **76** Ketidakadilan Terhadap  
Perempuan Bali Dalam  
Pariwisata
- I Gusti Ketut Widana **94** Masetra Bareng:  
Akulturasi Sosioreligi Krama  
Hindu-Jemaat Protestan

DHARMASMRTI

Vol. XII

No. 22

Hal. 1 - 111

Denpasar  
Oktober 2013

ISSN  
1693 - 0304

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



# DHARMASMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. XII Nomor 22 Oktober 2013

ISSN : 1693 - 0304

## PELINDUNG

Ida Bagus Gde Yudha Triguna  
(Rektor Universitas Hindu Indonesia)

## PENANGGUNG JAWAB :

Ida Bagus Gunadha  
(Direktur Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia)

## DEWAN REDAKSI :

I Putu Gelgel (Ketua)  
I Wayan Budi Utama (Sekretaris)  
A.A. Ngurah Gede Sadiartha (Anggota)  
A.A. Ngurah Anom Kumbara (Anggota)  
I Wayan Sukarma (Anggota)  
Ida Bagus Jelantik (Anggota)

## PENYUNTING :

Gede Subawa Mas  
Gede Jaya Kumara  
Nanang Sutrisno

## TATA USAHA :

I Ketut Kebayan Adnyana  
I G. N. Agung Indrajaya  
Ida Bagus Kade Sugianta  
Luh Gede Sarimas

## SEKRETARIAT :

Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia  
Jl. Sangalangit, Tembau, Denpasar  
Tlp/Fax : (0361) 462346 / 467818  
Email: jurnal\_pascasarjana@unhi.ac.id  
Website : www.unhi.ac.id

## JURNAL ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN HINDU DHARMASMRTI

Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar sebagai media informasi dan Pengembangan Ilmu Agama dan Kebudayaan Hindu, terbit dua kali setahun yaitu setiap bulan April dan Oktober



# DHARMA SMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

*Handwritten signature:*  
Karminti

Vol. XII Nomor 22 Oktober 2013

ISSN 1693 - 0304

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>BRAHMAVIDYA DALAM PELAKSANAAN SUMPAAH COR .....</b>	<b>1-13</b>
I Nyoman Agus Sudipta	
<b>KAJIAN FENOMENOLOGI RITUAL NAMPAAH BATU DI PURA PUSEH DESA PAKRAMAN DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG .....</b>	<b>14-33</b>
I Putu Mardika	
<b>SISTEM RELIGI DALAM PLURALITAS BERAGAMA DI PURA ADITYA JAYA, RAWAMANGUN, JAKARTA .....</b>	<b>34-55</b>
Yenny Setiawati	
<b>KONSTRUKSI IDENTITAS HINDU ETNIS BALI DI LOMBOK TENGAH .....</b>	<b>56-75</b>
I Nyoman Murba Widana	
<b>KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN BALI DALAM PARIWISATA .....</b>	<b>76-93</b>
Ni Wayan Karminti	
<b>MASETRA BARENG: AKULTURASI SOSIORELIGI KRAMA HINDU-JEMAAT PROTESTAN DI DESA PAKRAMAN ABIANBASE-BADUNG .....</b>	<b>94-111</b>
I Gusti Ketut Widana	

# KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN BALI DALAM PARIWISATA

Ni Wayan Karmini

Abstrak

Terbukanya peluang berkarir di Hotel Berbintang Lima di kawasan wisata Sanur Denpasar, juga memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan Hindu untuk mengembangkan profesi. Akan tetapi iklim keterbukaan itu tidak selalu dapat dimanfaatkan oleh kalangan perempuan Hindu. Diasumsikan bahwa hambatan pengembangan karir di kalangan perempuan Hindu tersebut tidak terlepas dari masih kuatnya nilai-nilai yang terekonstruksi di dalam ideologi gender dalam kehidupan sosial Budaya masyarakat Bali. Karena posisinya sebagai orang Bali yang masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterikatan sosial, maka perempuan Hindu secara normatif merasa memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat. Sementara di dunia profesi, mereka juga terikat oleh aturan-aturan kelembagaan. Karena memainkan peran gandanya seperti inilah, maka perempuan Hindu yang bekerja di Hotel Berbintang Lima sering menghadapi kendala dalam mengembangkan karirnya.

## 1. Pendahuluan

Perempuan selama ini sering diposisikan sebagai kaum marginal dalam berbagai bidang kehidupan. Posisi perempuan seperti itu juga dialami oleh perempuan pada masyarakat Bali, baik secara akademik maupun ekonomi dalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini tentu saja memerlukan penanggulangan agar pemahaman terhadap berbagai aspek tentang kehidupan perempuan menjadi lebih luas, mendalam dan menyeluruh. Pemahaman itu dapat dipakai sebagai acuan untuk memberdayakan perempuan

ke arah suatu kemajuan yang berbasiskan pada kebutuhan nyata pada masyarakat Bali.

Kajian-kajian terhadap perempuan Bali sudah banyak dilakukan, antara lain yang dilakukan oleh Couteau (1994:86-96). Kajian tersebut mengangkat pemikiran tokoh perempuan Bali kontemporer yaitu Ida Ayu Agung Mas. Menurut Mas, secara ideal perempuan Bali setara dengan laki-laki. Namun dalam kenyataannya tidak demikian adanya, justru laki-laki yang lebih memiliki hak dan gerak perempuan sangat dibatasi, sehingga terjadi ketimpangan gender. Salah satu

prinsip yang digunakan untuk mendukung ketimpangan gender tersebut adalah sistem *purusa*, dan hal itu harus dilihat dari kaca mata budaya. Namun demikian, menurut Mas dalam kajian Couteau itu, disebutkan bahwa kebebasan yang masih dimiliki oleh perempuan Bali adalah pada pilihan-pilihan seksualnya. Selain itu kajian yang dilakukan L.K. Suryani (2003) telah memosisikan perempuan Bali pada dua konteks, yaitu konteks biologis dan konteks modernisasi, sehingga dihasilkan konstruksi formatif perempuan Bali yang berkarakter Bali. Terkait dengan sistem *purusa* di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leslie Dwyer (2000), bahwa cerita rakyat Bali yang berjudul *Men Brayut* mengandung suatu ideologi *purusa* termasuk juga dalam cerita rakyat Bali yang berjudul *Tuang Kuningjuga* terkandung ideologi *purusa* (Artika, 2006)

Terkait dengan upaya menciptakan pemahaman itulah maka analisis aktivitas berperspektif gender khususnya terhadap perempuan Bali dalam sektor kepariwisataan tidak saja penting tetapi juga amat diperlukan, baik dilihat dari segi akademik maupun dilihat dari kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam melakukan analisis aktivitas berperspektif gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*). Hal ini disebabkan oleh (Fakih, 1996:5-6) : *pertama*, karena

mempertanyakan status perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, bahkan mempertanyakan posisi perempuan pada dasarnya berarti menggoncang struktur dan sistem *status quo* ketidakadilan tertua dalam masyarakat; *kedua*, dengan membahas masalah gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi dan menggugat *privilege* yang dimiliki selama ini. Selain itu menurut Abdullah (2006:6) perbedaan status, kelas, usia, gender, dan berbagai parameter lain menjadi relevan untuk diperhatikan sehingga makna kebudayaan menjadi sesuatu yang batas-batasnya tidak tegas tergantung pada posisi struktural masing-masing orang atau kelompok. Namun demikian dalam menciptakan rasa keadilan, meskipun pembahasan masalah yang berperspektif gender dapat menghadapi ketidaktegasan dalam memaknai budaya laki-laki dan budaya perempuan serta juga akan menghadapi perlawanan, analisis ini tetap perlu dilakukan, apalagi di propinsi Bali jika dilihat jumlah penduduknya pada tahun 2012 yang lalu antara jumlah penduduk laki-laki jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hampir sama. Kondisi ini jika tidak disertai dengan penanganan yang baik dan adil, akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menjadikan gender sebagai tonggak terjadinya ketidakadilan. Berikut disajikan label jumlah penduduk Bali menurut Kabupaten/Kota tahun 2012.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012**

Kabupaten/Kota	Jml. Penduduk Laki-Laki	Jml. Penduduk Perempuan	Total
Jembrana	110392	114598	224990
Tabanan	201046	204438	405484
Badung	190109	184268	374377
Gianyar	192130	191461	383591
Klungkung	83468	87276	170744
Bangli	105344	105842	211186
Karangasem	196703	198706	395409
Buleleng	305198	312878	618076
Denpasar	239036	224879	463915
<b>Bali</b>	<b>1623426</b>	<b>1624346</b>	<b>3247772</b>

Sumber: Buku Saku Sekilas Bali 2012 terbilan BPS hal 6.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa 49% dari total penduduk Bali pada tahun 2012 adalah laki-laki, sedangkan 51% adalah penduduk perempuan. Ini berarti dilihat dari sisi jumlah, pada tahun 2012 penduduk perempuan mendominasi Bali. Dari Tabel 1 juga terlihat bahwa ada beberapa kabupaten yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng. Dengan demikian dari delapan kabupaten dan kota di Bali, hampir mayoritas kabupatennya berpenduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Keadaan ini perlu penanganan yang serius sehingga fenomena ketidakadilan berperspektif gender dapat dicegah. Lebih lanjut jika diredungkan dengan seksama, perbedaan gender sesungguhnya

tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Dalam kenyataannya perbedaan gender ternyata melahirkan ketidakadilan terutama bagi perempuan termasuk bagi perempuan yang bekerja di sektor pariwisata. Ketidakadilan yang menimpa perempuan Bali yang bekerja di sektor pariwisata berupa: pembenrukan stereotipe atau pelabelan negatif atau mengalami pelecehan seksual di tempat bekerja.

Secara umum ada beberapa bentuk ketidakadilan yang dapat menimpa perempuan antara lain posisi perempuan yang sering tersubordinasi dan termarginalisasi, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Ketidakadilan tersebut saling kait mengkait dan bersifat dialektis. Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan,

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1993 Pasal 1 menyebutkan bahwa "kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi" (Jurnal Perempuan Nomor 26 Tahun 2002 hal. 13).

Dalam membahas gender selalu yang dijadikan acuan adalah perempuan, oleh karena itu konsep yang penting dan perlu dipahami dalam rangka membahas perempuan adalah konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Kata seks (jenis kelamin) merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya (Fakih, 1996:3-9). Misalnya: perempuan dikenal sebagai lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri-ciri atau sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan, artinya ada juga laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Sedangkan menurut Andrew Edgar dan Peter Sedgwick (1999) dalam Ratna (2005:224) mendefinisikan gender

sebagai lawan seks, dan gender bersifat psikologis cultural, sebagai perbedaan antara *masculine-feminine*. Sedangkan seks bersifat fisiologis, secara kodrati, sebagai perbedaan antara *male-female*. Meskipun dalam membahas perempuan selalu terkait dengan jenis kelamin dan gender, namun keduanya bukanlah merupakan korelasi absolut (Moore, 1988; Fakih, 1996; Abdullah, 2001).

Pembedaan kedua konsep ini dilakukan dalam kaitan pemahaman terhadap ketidakadilan sosial yang sering dialami oleh perempuan, dan dari sinilah lahir analisis gender. Ini berarti analisis gender merupakan analisis kritis yang mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Sebut saja analisis diskursus (*discourse analysis*) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser, mereka mengkritik semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis dibawah pengaruh modernisme. Demikian juga analisis hegemoni ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik terhadap analisis kelas yang dianggap sangat sempit. Kedua analisis di atas tanpa diikuti oleh analisis gender, sehingga kritik mereka kurang mendalam serta kurang mewakili semangat pluralisme yang diimpikan. Lebih lanjut Escobar (1989) menggunakan cara analisis yang dipakai Foucault untuk menganalisis hubungan yang bersifat dominatif antara dunia ketiga dengan negara barat melalui diskursus *developmentalism*. Oleh karena itu pada bagian tersendiri akan diuraikan hubungan antara perempuan dalam pembangunan (WID = *Women in development*) dengan *developmentalism*.

Dalang kerangka studi kultural, pembahasan tentang feminisme dan gender muncul sebagai akibat kondisi perempuan yang tersubordinasikan atas kebudayaan, artinya kebudayaanlah yang menyebabkan perempuan dianggap sebagai memiliki kedudukan yang lebih rendah dengan laki-laki, dan bukan semata-mata karena kondisi biologis perempuan (Ratna, 2005:226). Sementara itu menurut Rosaldo (1974:23) dan Moore (1994:10-11) mengatakan bahwa subordinasi perempuan itu tidak bersifat kultural, tetapi juga berakar dari pembagian kerja berdasarkan gender. Pembagian kerja itu bersumber pada asosiasi simbolik antara perempuan dengan alam (*nature*) dan laki-laki dengan budaya (*culture*). Perempuan dengan fungsi reproduksinya diasosiasikan dengan domestik dan laki-laki dengan lingkungan publiknya melahirkan hubungan hirarki yakni laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior. Proses eksternalisasi merupakan fakta antropologis yang mendasar, dan sangat mungkin berakar dalam lembaga biologis manusia (Berger, 1994:5).

## 2. Perempuan dan Etos Kerja

Artadi (1993) menunjukkan bahwa secara umum perempuan Bali termasuk pekerja keras. Gejala ini berkaitan dengan ideologi patriarki sebagaimana tercermin dari adanya sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Bali. Sistem ini mengakibatkan perempuan yang telah menikah harus masuk dan tinggal di lingkungan kerabat suaminya. Bahkanyang tidak kalah pentingnya, ideologi patriarki mengakibatkan perempuan tersubordinasi oleh laki-laki ataupun suaminya. Kondisi

ini mendorong perempuan bekerja keras agar eksistensinya dihargai oleh suami maupun lingkungan keluarganya (Atmadja, 1998). Mereka *jengah pang ngelah ja sekaya* (mereka berjuang keras agar memiliki penghasilan secara mandiri) sehingga kehidupan mereka tidak mutlak tergantung pada sang suami. Bahkan berkat kemandirian itu status mereka bisa pula terangkat di mata suami maupun lingkungan keluarganya.

Gambaran perempuan Bali sebagai pekerja keras yang tidak kalah hebatnya daripada laki-laki digambarkan dalam Majalah Sarad (Edisi I, Nomor 12, 2000: 21-22) yang khusus menelaah tentang budaya Bali, sebagai berikut: Tak cuma lelakinya, kaum perempuan Bali pun pekerja ulet. Dengan bekerja perempuan Bali merasa bermakna, mandiri, dihargai, tidak menengadahkan tangan kepada suami. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa ada kesepakatan bahwa perempuan Bali tergolong perempuan yang ulet berkerja guna mensejahterakan kehidupan rumah tangganya.

Dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis pekerjaan yang dianggap bernilai tinggi dalam masyarakat adalah pekerjaan yang mampu menghasilkan uang tunai. Apalagi di era sekarang ini, manusia terjerat pada budaya belanja yang berlebihan (*konsumerisme*), bahkan telah mengarah pada pembentukan masyarakat yang menganut sistem ekonomi libido, maka kepemilikan akan uang agar bisa memenuhi nafsu mereka untuk mengkonsumsi aneka jasa dan barang yang persediaan melimpah di pasar menjadi amat penting (Lury, 1998; Piliang, 1998, 1999). Kondisi masyarakat seperti



ini dapat mendorong laki-laki maupun perempuan untuk bekerja lebih keras lagi, agar nafsu mereka mengkonsumsi barang dan atau jasa terpenuhi secara berkelanjutan, bahkan dalam kondisi yang semakin meningkat, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Jika hal ini dibiarkan menurut Abdullah (2006: 112) akan membentuk etos kerja kapitalistik yang berorientasi pada pencarian "kehidupan yang lebih baik". Hal ini mengingat bahwa keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi tidak saja di sektor domestik tetapi juga disektor publik, sehingga mereka tidak berada pada situasi menanti rejeki yang berasal dari sang suami yang penuh dengan ketidakpastian.

Wijaya (1995) menunjukkan di beberapa daerah umumnya perempuan amat bergairah sebagai pekerja rumahan, karena kegiatan tersebut bisa dipadukan secara elastis dengan kegiatan domestik. Gejala ini menarik untuk ditelaah, terutama bertalian dengan latar belakang yang menyebabkan mereka begitu antusias menggunakan waktu untuk mengisi peluang kerja yang tersedia. Dengan mengacu kepada Weber (1979), Bellah (1992) dan Mubyarto *et al.* (1991) gejala ini tidak terlepas dari superstruktur ideologi yang mereka miliki, terutama bertalian dengan etos kerja. Etos kerja menentukan sikap dan perilaku manusia dalam menangani suatu pekerjaan. Namun dalam kenyataannya, faktor lain yang bersumber dari struktur sosial dan infrastruktur material, tentu tidak bisa diabaikan, karena bisa pula memberikan penguatan atau kendala terhadap etos kerja (Alatas, 1988; cf. Sanders, 1993; Burn, Baumgartner dan Devilie, 1987).

Oleh karena itu, usaha untuk menjelaskan antusiasme perempuan Bali terjun ke sektor nafkah, dengan sendirinya tidak hanya dicari pada etos kerja, melainkan perlu pula ditelusuri pada aspek-aspek lain yang tercakup di dalam struktur sosial dan infrastruktur material yang mereka miliki.

Dalam kearifan lokal Bali, konsep etos kerja telah digubah dalam karya berbahasa Bali yang bernama *Salampah Laku* (Suastika, 2006:283), dimana yang dimaksud dengan etos kerja adalah usaha yang sangat bermakna lewat perbuatan maksimal yang ditempuh lewat usaha yang sadar dan merupakan panggilan suci. Sementara itu perempuan Bali menganggap kerja adalah *yadnya* yang perlu dijalani serta diamankan untuk peningkatan kualitas diri. Konsep peningkatan kualitas diri melalui etos kerja direspon oleh masyarakat Bali, sebagai contoh Geertz (1977) seperti dikutip Suastika (2006:282) tentang kebangkitan bangsawan di Tabanan pada tahun 1960-an untuk bangkit ke sektor perdagangan dan perhubungan. Mereka mendirikan berbagai firma seperti transportasi yang pada saat itu kebutuhannya sangat dirasakan manfaatnya. Ini dikatakan sebagai kebangkitan budaya kewirausahaan masyarakat Bali pada waktu itu. Marzali (2005:90-92) mengemukakan bahwa wirausaha (*entrepreneurship*) berkaitan dengan "mentalitas manusia" yang kreatif, inovatif, berani menghadang resiko, hidup secara berencana, menghargai waktu dan sebagainya, yang akan membentuk etos kerja. Mentalitas manusia ada yang menyebut *human factor* (Inkeles, 1966), faktor kultural (Rogers, 1969), *the state*



*of mind* (Harrison, 1995), faktor non ekonomi (Kuntjoro Jakti, 1972), faktor psikokultural (Budiman, 1989) dan sikap mental (Koentjaraningrat, 1974). Dalam kesehariannya, perempuan Bali meskipun mengalami ketidakadilan, namun mereka tetap berkobar semangatnya untuk memperoleh nafkah serta mampu berwirausaha secara kecil-kecilan, antara lain berjualan *canang* atau sekedar membuka *warung* yang menjual makanan sehari-hari.

Dalam melaksanakan perbuatan maksimal terkait dengan etos kerja, ada tiga model yang terkait yaitu *dharmayatra*, *dharma karya* dan *lascarya*. Menurut Suastika (2006:283-287) *Dharma Yatra* mengandung makna pengisian diri secara maksimal dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (teknologi) yang dapat digunakan sebagai pandangan dan pegangan dalam menjalankan kehidupan, dicapai melalui proses pendidikan yang tidak pernah putus. *Dharma Karya* adalah perilaku yang kuat dan kokoh dalam berkarya. Selanjutnya konsep ini merupakan etos kerja, yaitu sikap batin yang melahirkan semangat sehingga ulet dalam bekerja, kemudian tekad ini dipakai dasar dalam berkarya, sehingga terpacu untuk bekerja secara optimal dengan kebulatan tekad untuk menyelesaikannya, serta menghasilkan karya yang berkualitas dan bermutu. *Lascarya* mengandung makna bahwa dalam berkarya meniru konsep *kedis sangsiyah*, bahwa dalam berkarya atau berprofesi didasarkan atas *dharma* dan keikhlasan, selalu berani berbuat, selalu belajar berkarya dan mengabdikan sepenuhnya di dalam masyarakat Bali. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (1993:271) etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.

Antusiasme mereka terjun ke sektor publik untuk mencari nafkah dapat mengakibatkan sumbangan wanita terhadap aset ekonomi rumah tangga mereka menjadi amat berarti. Hal ini tentu mempengaruhi posisi wanita di lingkungan keluarga, bahkan bisa terhindar dari posisi ter subordinasi oleh laki-laki, sebagaimana yang diamanatkan dalam ideologi patriarki. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Sanderson (1993) atau Marx (dalam Elster, 2000; Magnis Suseno, 1999) bahwa ketimpangan penguasaan aset antara laki-laki dengan perempuan bisa memperkuat subordinasi laki-laki terhadap wanita. Sejalan dengan gagasan ini menarik pula untuk dikaji tentang posisi politisi perempuan pada masyarakat Bali sebagai implikasi dari keterlibatan mereka dalam memberikan sumbangan kepada aset keluarga mereka. Dalam konteks inilah pola pembagian kekuasaan dalam keluarga merupakan hal penting untuk dibahas.

### 3. Pola Pembagian Kekuasaan dalam Keluarga

Dengan mengikuti Dahrendorf (1986) dalam setiap hubungan sosial, termasuk hubungan suami istri dalam keluarga selalu terselip aspek yang terkait dengan kepemilikan kekuasaan. artinya dalam hubungan sosial tersebut ada aktor yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga dia mampu mengarahkan perilaku aktor lainnya sesuai dengan apa yang diinginkannya (Martin,

1990). Bahkan dalam perspektif teori sosial-konflik, karena kekuasaan yang dimilikinya maka dalam keluarga terdapat hubungan kelas, yakni kelas kapitalis dengan kelas proletar, di mana yang satu menindas yang lainnya. Disamping itu terkait dengan konflik, Sunastri (2004) mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan dan laki-laki sulit melakukan pembagian waktu karena pekerjaan di kantor dan di masyarakat keduanya sangat penting dan datangnya bersamaan.

Berdasarkan kelas-kelas yang ada pada teori sosial-konflik, maka pendistribusian kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan bisa dijelaskan dengan

berbagai teori antara lain "resources theory of power" (Havemann dan Lehtinen, 1986:227-228). Menurut teori ini sumber ketimpangan tersebut bertalian dengan penguasaan sumber daya meterial, pendidikan, prestise kerja dan latar belakang keluarga. Barang siapa yang lebih banyak menguasai sumber daya tersebut, baik dalam artian kualitas maupun kuantitas, maka ada kemungkinan mereka akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada yang lainnya.

Terkait dengan sumber ketimpangan yang berasal dari pendidikan, berikut disajikan data tentang pendidikan tertinggi yang diperoleh oleh penduduk Bali bulan Februari 2010 terutama bagi penduduk yang tercatat sudah bekerja.

**Tabel 2**  
**Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Di Propinsi Bali, Bulan Februari 2012.**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum/tidak pernah sekolah	61458	97967	159425
Tidak Lulus SD	87052	98459	185511
SD	288434	269513	557947
SMP	162479	109088	271567
SMU	237471	117331	354802
SMK	94968	52218	147186
DI/II	25724	18797	44521
DII/Sarjana Muda	12500	8886	104479
S1/S2/S3	71379	33100	104479
<b>Jumlah</b>	<b>1041465</b>	<b>805359</b>	<b>1846824</b>

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2012.

Dari data pada Tabel 2 dapat dikemukakan bahwa secara kuantitas terjadi ketimpangan pendidikan pada penduduk Bali yang sudah bekerja sampai dengan Februari 2012, dimana penduduk laki-laki secara kuantitas dari tamat SMP sampai dengan tamat S3 lebih banyak dari penduduk perempuan, sedangkan unruk yang belum/tidak pernah sekolah sampai tamat SD perempuan lebih banyak dari laki-laki. Gambaran data ini memberikan makna bahwa secara kuantitas, pendidikan laki-laki di Bali sampai Februari 2012 terutama bagi yang sudah bekerja lebih baik dibandingkan dengan pendidikan perempuan. Kondisi ini jika dibiarkan berpotensi untuk melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, hegemoni laki-laki terhadap perempuan atau bahkan mensubordinasikan perempuan secara terus menerus.

Model penjelasan serupa itu, namun dengan cakupan yang lebih luas, dikemukakan pula oleh teori materialis non-Marx. Penganut teori ini mengkaitkan ketimpangan tersebut dengan kondisi teknologi, ekonomi, demografi dan ekologi khusus. Kondisi-kondisi tersebut menghendaki partisipasi besar perempuan dalam bidang produksi ekonomi. Hal ini bisa menimbulkan implikasi bahwa perempuan dapat menduduki status yang relatif tinggi dalam masyarakat. Kalau tidak, mereka cenderung tersubordinasi oleh laki-laki (Sanderson, 1993). Burns, Baumgartner dan Devilie (1988) berpendapat bahwa dalam suatu sistem sosial akan ada hubungan kekuasaan, di mana yang satu berhak mengatur atau mengontrol yang lainnya, sehingga dia mau berperilaku sebagaimana yang

diharapkannya. Kepemilikan kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari sumber kekuasaan yang dipunyainya.

Sumber kekuasaan itu dapat berupa informasi, lambang, sebuah aturan atau sumber lain. Juga atribut dapat berguna sebagai basis kekuasaan, pendidikan menengah, penampilan yang menarik, reputasi keahlian. Kekayaan dan hal-hal yang berharga pada umumnya, alat-alat produksi, alat pemaksa, begitu pula kedudukan sosial, hak serta kewajiban, jaringan hubungan sosial dan organisasi dapat dikerahkan dan dimanfaatkan dalam proses pengawasan sosial (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988:193-194). Sedangkan Sajogyo (1983) menunjukkan bahwa basis kekuasaan bisa bersumberkan dan atau berkaitan dengan proses sosialisasi, pendidikan, latar belakang perkawinan, kedudukan dalam masyarakat dan pengaruh luar lainnya. Dengan demikian jelas terlihat bahwa sumber kekuasaan amat kompleks, yakni tidak semata-mata terkait dengan sumber daya ekonomi tetapi terkait pula dengan sumber daya sosial, budaya dan fisik. Mereka yang memilikinya secara lengkap, dengan sendirinya akan bisa menguasai pihak lainnya. Besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki seseorang antara lain tercermin pada hubungan perempuan dan laki-laki dalam keluarga, yakni dalam bentuk tindakan "menyusun atau mengatur kondisi-kondisi, mengatur masukan dan proses-proses pengambilan keputusan serta tindakan dari pelaku sosial lainnya" (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988:193). Pola pengambilan keputusan dalam keluarga tidak bisa dilepaskan dari hubungan kekuasaan. Hal ini tidak bisa

dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa pola pengambilan keputusan dalam keluarga pada hakekatnya menggambarkan bagaimana pola atau struktur kekuasaan dalam keluarga (Lestari, 1990). Bahkan, menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) metode yang sering digunakan untuk mengukur kekuasaan dalam keluarga adalah dengan menanyakan siapa yang mengambil keputusan terakhir tentang sejumlah persoalan dalam keluarga.

Berkenaan dengan itu, Sajogyo (1983) menunjukkan bahwa ada berbagai variasi dalam pengambilan keputusan pada suatu keluarga, yakni :

- (1) Pengambilan keputusan hanya oleh istri.
- (2) Pengambilan keputusan hanya oleh suami.
- (3) Pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, di mana istri lebih dominan.
- (4) Pengambilan keputusan oleh suami dan istri bersama, di mana suami yang dominan.
- (5) Pengambilan keputusan bersama oleh suami dan istri, setara.

Sedangkan White sebagaimana dikutip Sukesni (1995:325-336) memilah bahwa ada tiga stereotipe umum dalam masyarakat yang saling bertentangan, yakni: (1) hubungan laki-laki dan perempuan yang berbeda tetapi setara; (2) berbeda dan tidak setara, yang ditunjukkan oleh kekuasaan perempuan yang nyata tetapi tersembunyi; (3) berbeda dan tidak setara, dalam bentuk penundukkan perempuan yang nyata tetapi tersembunyi. Dengan demikian, tampak bahwa dalam pengambilan keputusan di lingkungan

keluarga ada beberapa variasi yang mungkin terjadi yang pada intinya bisa setara atau yang satu mendominasi yang lainnya.

Keputusan pada dasarnya merupakan hasil dari kekuasaan yang kelahirannya melalui proses kekuasaan. Hal ini tidaklah statis, melainkan berdinamika dalam arti pada saat mereka menelorkan keputusan, selalu ada kemungkinan bahwa yang satu memberikan perlawanan terhadap pihak lainnya. Karena itu agar proses kekuasaan bisa berjalan dengan baik, pihak-pihak yang terlibat bisa berkonvergensi, yakni bermufakat sehingga perbedaan yang ada terjembatani yang akhirnya membawa mereka ke arah satu haluan dalam memilih berbagai alternatif yang ada guna mewujudkan tujuan yang mereka inginkan (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988). Namun, dalam konvergensi itu pihak yang berkuasa akan memiliki daya tawar yang lebih besar, mengingat bahwa dengan kekuasaannya, dia bisa mendominasi pihak lainnya dengan cara menerapkan hukuman dan ganjaran. Selain itu, mereka bisa pula menghegemoni pihak lainnya, misalnya melalui pendidikan/pengetahuan atau propaganda dengan menggunakan idiom-idiom budaya, sehingga kepatuhannya terhadap penguasa terlegitimasi secara kultural (Burns, Baumgartner dan Devilie, 1988; Sugiono, 1999; Simon, 2000; Hendarto, 1993).

Aplikasi kekuasaan dalam bentuk pengambilan keputusan bisa tercermin pada berbagai aktivitas dalam keluarga, areanya bisa amat luas dan kompleks. Namun dengan mengikuti Lestari (1990) dan Scanzoni dan Scanzoni (1981), dan dengan memperhatikan pula arena

kegiatan suatu keluarga pada masyarakat Bali (Atmadja, 1988) maka medan sosial yang bisa memberikan makna bagi adanya hubungan kekuasaan antara istri-suami dapat dilihat pada beberapa aspek, antara lain:

- (1) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Hal ini penting, karena merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup suatu keluarga.
- (2) Pengambilan keputusan dalam beberapa persoalan rumah tangga. Persoalan keluarga amat banyak, karena itu bisa dikhususkan pada aspek-aspek tertentu saja, yakni pengambilan keputusan yang berkaitan dengan menu sehari-hari, pembelian perabot rumah tangga maupun barang-barang berharga, alat-alat produksi kenelayanan, dan pendidikan anak-anak.
- (3) Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterlibatan istri maupun suami dalam memilih suatu pekerjaan, mengikuti kegiatan pada lingkungan desa adat, desa dinas, partai politik, dll.

Dengan memperhatikan pola pengambilan keputusan pada medan sosial tersebut diharapkan bentuk pendistribusian kekuasaan dalam keluarga akan bisa terpahami secara global.

Berbicara masalah kekuasaan menurut Foucault (dalam Lubis, 2004:163-165) menyebutkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang ada begitu saja, tetapi dibentuk melalui relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu dengan memproduksi kebenaran,

dan kebenaran itu ada dalam kekuasaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kuasa terkait dengan pengetahuan, karena demikian eratnya hubungan diantara keduanya sehingga tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada pula kuasa tanpa pengetahuan. Bagi Foucault kuasa bukan sebagai ontologi, akan tetapi lebih merupakan strategi yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Kajian Pustaka Perempuan Dalam Pariwisata

Kajian pustaka tentang pengaruh pariwisata dalam proses pembangunan memperlihatkan perhatian yang kecil terhadap peran perempuan. Beberapa penelitian mencatat bahwa pariwisata turut andil dalam perubahan peran gender perempuan di beberapa tempat, sedangkan penelitian lain mencatat bahwa pariwisata memperluas kesempatan perempuan berperan dalam bidang ekonomi, sosial bahkan politik. Di beberapa tempat, perempuan lebih berperan dalam perubahan kegiatan ekonomi yang dibawa pariwisata dan dapat mendapat keuntungan dari perubahan ini dibandingkan pria (Brown dan Switzer, 1991). Walaupun demikian banyak penelitian yang mengungkapkan dampak negatif yang umumnya berkisar pada eksploitasi perempuan karena pelacuran atau pelecehan seksual dalam kegiatan pariwisata (Truong, 1990; Holden, Horlemann, Pfaffin, 1985).

Pariwisata sebagai perjalanan dengan memanfaatkan waktu luang (*leisure time*) dan sebagai industri yang mendukungnya dibentuk oleh hubungan-hubungan manusia sehingga dipengaruhi oleh hubungan gender yang bersifat lokal

maupun global (Swain, 1995). Hubungan antara *host* dan *guest* bisa dianalisis dengan berbagai macam karakteristik seperti gender, kelas, usia, etnis dan ras serta negara. Studi-studi teoritis tentang pariwisata dan hubungan sosial akhir-akhir ini kurang memperhatikan isu gender secara substansial. Namun demikian Kinnaird (1994:14) justru mengarahkan pertanyaan yang bersifat fundamental tentang pembagian kerja, baik yang berupah (*paid work*) maupun yang tidak, dan implikasinya pada hubungan gender baik bagi *host* maupun *guests*.

Selain itu beberapa penelitian juga telah menemukan bahwa pariwisata telah membawa dampak bagi perluasan peluang kerja, berupa mempertegas pembagian kerja gender atau mengubahnya sesuai dengan munculnya peluang kerja atau penghasilan baru (Monk dan Alexander, 1986; Levy dan Lerch, 1991).

Sementara itu dalam kaitan keterlibatan perempuan dalam pariwisata perlu mempertimbangkan peran ganda perempuan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan (Pratiwi, 1995). Dilain pihak, Mardani (1995:10) berpendapat bahwa peran ganda perempuan yang ingin diciptakan tanpa mengurangi beban tradisional atau sekurang-kurangnya menciptakan modifikasi dalam kehidupan sebagai perempuan tradisional adalah suatu hal yang akan menyulitkan perempuan.

## 5. WID dan Developmentalism

*Women in development* (WID) yang dalam *cultural studies* merupakan narasi besar dan harus ditolak, dibentuk sebagai jawaban atas kegagalan pembangunan (*developmentalism*), dan program

pembangunan tersebut hanya mampu menjawab persoalan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan. WID menjadi bagian diskursus pembangunan, dan merupakan sebuah pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga. Pada saat digulirkan, gagasan WID dianggap satu-satunya jalan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dialami perempuan di Dunia Ketiga. Namun dalam perjalanannya, WID dianggap bagian dari agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Dunia Ketiga. Konsep WID sendiri dianggap membawa bias feminis liberal, kelas menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan kepentingan kaum perempuan.

WID merupakan strategi utama *developmentalism*, lebih menghasilkan penjinakan dan pengekanan perempuan Dunia Ketiga, ketimbang membebaskan kaum perempuan. WID dalam perjalanannya banyak menuai kritik. Ada yang mengkritik dari segi ekonomi dan teknologi (Stamp, 1989; Boserup, 1970), dari aspek isu diskursus dan pengetahuan/kekuasaan (Mueller A., 1987), maupun dari aspek lingkungan (Shiva, 1989) serta aspek-aspek lainnya (Sen, 1987; Ahmed, 1985; Charlton, 1984; McCarthy, 1984; Dixon, 1980; de Wolf, 1986).

Jadi dapat disimpulkan bahwa WID merupakan strategi dan diskursus *developmentalism* untuk melanggengkan dominasi dan penindasan terhadap perempuan Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakan (*cooptation*) dan pengekanan (*regulation*) perempuan, dan berarti pula menghindari upaya emansipasi. Selain itu dalam tataran teori,



feminisme memunculkan emansipasi dan gender (Ratna, 2005:224) serta WID melanggengkan dominasi laki-laki, penindasan terhadap perempuan dan menghindari emansipasi. Sementara itu menurut Sztompka (2005:211) dari sisi sosiologi, aliran developmentalisme ini dianggap menggunakan pendekatan keteraturan proses sejarah dan keteraturan tersebut berkembang menurut kekuatannya sendiri serta bergerak menuju tujuan tertentu. Pendekatan ini diragukan dan banyak menuai kritik antara lain dari Karl R. Popper, Robert Nisbet, Charles Tilly dan terakhir dari Immanuel Wallerstein.

#### 6. Ketidakadilan Yang Menimpa Perempuan Bali Dalam Pariwisata

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Statistik Ketenagakerjaan Propinsi Bali 2010 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja perempuan 846.565 orang, sedangkan pada tahun 2005 bertambah menjadi 905.376 orang atau mengalami peningkatan 58.811 orang dengan pertumbuhan mencapai 6,95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja laki-laki, tahun 2004 jumlah angkatan kerja laki-laki mencapai 1.078.240, sedangkan tahun 2005 berjumlah 1.096.795 atau dengan pertumbuhan mencapai 1,72% (Statistik Ketenagakerjaan Propinsi Bali 2005, hal. 11-12). Sedangkan jika dilihat dari lapangan usahanya, pada tahun 2005 jumlah laki-laki Bali yang bekerja di bidang perdagangan, rumah makan dan hotel mencapai 178.797 orang (42%) dan untuk perempuan pada tahun 2005 jumlah yang bekerja pada bidang yang sama

mencapai 237.577 orang (58%) [Bali Dalam Angka 2006, hal. 63].

Berdasarkan data di atas, dari sisi pertumbuhan, baik untuk angkatan kerja maupun dari lapangan usahanya, pertumbuhan (*growth*) tenaga kerja perempuan Bali lebih baik dari tenaga kerja laki-laki Bali. Dengan tidak mengecilkannya makna pertumbuhan tersebut, memang dari sisi *cultural studies* pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dianggap gagal menjalankan perannya. Kondisi kegagalan tersebut antara lain ditandai dengan timbulnya masalah terhadap tenaga kerja perempuan Bali di bidang pariwisata berupa marginalisasi di berbagai proyek kepariwisataan dan pengembangan masyarakat, marginalisasi perempuan di sektor publik pariwisata yang berorientasi kekuasaan, kekerasan, pelecehan dan berbagai stereotipe negatif yang sering menimpa perempuan Bali. Semua masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada ketidakadilan terhadap pekerja perempuan Bali.

Dengan mengesampingkan latar belakang pendidikan pekerja perempuan Bali seperti telah diuraikan pada Tabel 2, kiranya semua masalah yang ditimbulkan oleh kegagalan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan seperti diuraikan sebelumnya dan berdampak pada pekerja perempuan bidang pariwisata di Bali harus disikapi sebagai kekurangmampuan *stake holder* yang terkait dengan ketenagakerjaan bidang pariwisata di Bali, baik itu pemerintah (dalam menciptakan rambu-rambu yang mengatur tenaga kerja) dan kalangan dunia usaha (sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja).



Kedua *stake holder* tersebut kurang memperhatikan aspek budaya dari pekerja perempuan Bali, sehingga perempuan Bali hanya dijadikan mesin uang dari kapitalis yang diwakili oleh pengusaha, serta hegemoni pemerintah terhadap para pekerja perempuan di sektor pariwisata (baik pekerja formal maupun informal) untuk mau mengikuti dan mentaati berbagai aturan yang ditetapkan tanpa sebelumnya mengajak pekerja kaum perempuan untuk bermusyawarah tentang berbagai aturan tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diajukan rekomendasi sebagai berikut: [1] dalam jangka pendek perlu dilakukan tindakan antara lain: a) menggalakkan kembali berbagai organisasi perempuan yang telah ada, b) kaum perempuan mulai memberi pesan tegas akan penolakan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, c) memberi pelajaran kepada kaum perempuan tentang berbagai teknis praktis menghentikan kekerasan, pemerkosaan dan pelecehan, d) lebih aktif menyampaikan *umeg-umeg* perempuan pada kolom pembaca di media massa cetak seperti koran, e) melancarkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan; [2] dalam jangka panjang perlu dilakukan peperangan terhadap berbagai hambatan di masyarakat yang bersifat ideologi, antara lain dengan melakukan kesadaran kritis dan pendidikan umum kepada masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender dengan berbagai langkah pendukungnya, antara lain dengan melakukan berbagai studi yang terkait dengan ketidakadilan gender. Hasilnya dapat dijadikan bahan dalam

rangka melakukan advokasi yang terkait dengan ketidakadilan gender.

- \* Tulisan ini merupakan pengembangan dari makalah disampaikan pada PKK Desa Dalung Kab. Badung. Perempuan Hindu Terpasung dalam Adat, disampaikan tanggal 22 Desember 2012.
- \* Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah VIII DPK pada UNHI Denpasar

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2001. "Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan : Pemecahan Konflik Etnis di Indonesia", *Antropologi Indonesia*, Vol. 25, No. 66.
- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Artika, I Wayan. 2006. "Tuung Kuning" dan "Men Brayut": Kajian Kritis Tentang Perempuan Bali dan KDRT. Dalam *Jurnal Kajian Budaya Volume 3 Nomor 6 Juli 2006*. Halaman 113-128.
- Anonim. 2002. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (Nomor 26).
- Adhiti, Ida Ayu Iran. 2003. *Perempuan Bali dalam Konteks Pariwisata di Bidang Kewirausahaan : Studi*

- Kasus di Kecamatan Kuta Utara. Tesis S2 Kajian Budaya Unud, Denpasar.
- Alatas. 1988. *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam Kapitalisme Kolonial*. (A. Rofi'ie Penerjemah). Jakarta: LP3ES.
- Artadi, I Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Atmadja, N.B. 1998. *Memudarnya Demokrasi Desa: Pengelolaan Tanah Adat, Konversi dan Implikasi Sosial dan Politik di Desa Adat Julah, Buleleng, Bali*. (Disertasi tidak diterbitkan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta).
- Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. *Buku Saku Sekilas Bali 2010*.
- Bellah, R.N. 1992. *Relegi Tokugawa Akar-akar Budaya Jepang*. (Wardah Hafidz dan Wladi Budihargo Penerjemah). Jakarta: PT. Gramedia.
- Boserup, E. 1984. *Peranan Wanita dalam Pembangunan Ekonomi*. (Mien Joebhaar dan Sunarto Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burns, T.R., Th. Baumgartner dan Ph. Devilie. 1988. *Manusia, Keputusan, Masyarakat Teori Dinamika antara Aktor dan Sistem untuk Ilmuwan Sosial*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Brown, Valeric A. dan Margaret A. Switzer. "Engendering the Debate", A Discussion paper for Consideration by the Ecologically Sustainable Development Working Groups, Australian National University, June 1991.
- Couteau, Jean dan Usadi Wiryatnaya. 1994. *Bali di Persimpangan Jalan 1, 2*. Denpasar: Nusadata Indobudaya.
- Dahrendorf, R. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa-Kritik*. (Ali Mandan Penerjemah). Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gayatri, Ni Putu G. 2003. *Peranan Perempuan Bali dalam Pelestarian Budaya dan Pengembangan Pariwisata : Studi Kasus di Desa Pakraman Kuta*. Tesis S2 Kajian Budaya Unud, Denpasar.
- Giddens, A. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya-Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*. (Soeheba Kramadibrata Penerjemah). Jakarta: UI Press.

- Havemann, E. dan M. Lehtinen. 1996. *Marriages and Families New Problems, New Opportunities*. New Jersey: Prentice-Hall Englewood.
- Hendarto, H. 1993. Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci. Dalam Tim Redaksi Driyarkara (ed.), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 66-89.
- Holden, Peter, Jurgen Horlemann dan Geog Pfaffin (eds). 1985. *Tourism, Prostitution, Development*. Stuttgart/Colegne: ECTWT-ZEB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1993. Jakarta: Balai Pustaka Depdikbud.
- Kinnaird, Vivian dan Derek Hall (eds). 1994. *Tourism: A Gender Analysis*. Chichester : Wiley.
- Lestari, I. 1990. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga. Dalam T.O. Ihromi (ed.). *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Halaman 87-101.
- Levy, Diane dan Patricia Lerch. *Tourism as a Factor in Development : Implication for Gender and Work*. *Gender and Society* 5:67-85.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Setelah Kebenaran dan Kepastian Dihancurkan Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan Kaum Posmodernis*. Bogor: Akademia.
- Lury, C. 1998. *Budaya Konsumen*. (Hasti T. Champion Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Magnis-Suseno, F. 1978. *Menuju Etos Pekerjaan yang Bagaimana?.* *Prisma Majalah Kajian Ekonomi Sosial*. VII, Nomor 11. Halaman 22-31.
- Magnis-Suseno, F. *Karl Marx dari Utopis Jce Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. "Wanita dan Pembangunan Pariwisata Budaya". Makalah tidak dipublikasikan dalam Simposium Nasional Gender dan Pembangunan Pariwisata. Yogyakarta, 27-28 Maret 1995.
- Marzali, Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mubayrto et al. 1991. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: P3PK-UGM.

- Monk, Janice dan C. Alexander. "Freeport Fallout : Gender, Employment and Migration on Margarita Island". *Annals of Tourism Research* 13 : 393-413.
- Moore, Henrietta L. 1988. *Feminism and Anthropology*. Cambridge: Polity Press.
- Moore, Henrietta L. 1994. *A Passion for Differences: Assay in Anthropology and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Piliang, Y.A. 1998. *Dunia yang Dilipat Realitas Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan.
- Piliang, Y.A. 1999. *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Pratiwi, Wiwik Dwi. "Pemampuan Wanita Pedesaan dan Pembangunan Pariwisata". Makalah tidak dipublikasikan dalam Simposium Nasional Gender dan Pembangunan Pariwisata. Yogyakarta, 27-28 Maret 1995.
- Ratna, Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosaldo, Michelle dan L. Lhamphere. 1974. *Woman, Culture and Society*. California: Stanford University Press.
- Sanderson, S.K. 1993. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. (Farid Wijidi dan S. Menno Penerjemah). Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Sajogyo, P. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Suastika. 2006. Etos Kerja Wanita Bali : Refleksi Nilai Karya Sastra Dan Aktualitasnya Dalam Kehidupan Masyarakat. Dalam (ed) *Bali Bangkit Bali Kembali*. Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dengan Universitas Udayana Denpasar. Halaman 279-316.
- Sukesi, K. 1995. Wanita dalam Perkebunan Rakyat: Hubungan Kekuasaan Pria-Wanita dalam Perkebunan Tebu. Dalam T.O Ihromi ed. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Halaman 351-375.
- Sunastri, I Gusti Ayu. 2004. Konflik Peran Perempuan Bali di Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Tesis S2 Kajian Budaya Unud, Denpasar.
- Suryani, L.K. 2003. *Perempuan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Scanzoni, L. D. dan J. Scanzoni. 1981. *Men, Women and Change*. New York, N.Y.: McGraw Hill

- Stompka, Piotr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Weber, M. 1979. Sekte-Sekte Protestan dan Semangat Kapitalisme. Dalam T. Abdullah (ed.), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta. LP3ES. Halaman 1-41
- Wijaya, H.R. 1995. "Peran Perempuan dan Perdagangan Dunia". *Prisma Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial*, XXIV, Nomor 6 Halaman 43-61.
- Wijaya, H.R. 1996. "Penelitian Berspektif Gender." *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 4/November 1996. Halaman 7-20.
-